Kesepakatan RCEP, Apa Untungnya bagi Indonesia?

INDONESIA bersama 14 negara lain sepakat membangkitkan harapan atas bencana resesi ekonomi dialami di era pendemi Covid-19 secara multilateralisme untuk menemukan model *recovery* ekonomi bersama pasca penandatangan secara virtual 15 November 2020 baru-baru ini. Pasti ada pihak yang menilai kesepakatan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) ini adalah strategi Tiongkok mendominasi pengaruhnya untuk perdagangan di Asia.

Tiongkok Wajib Memperhitungkan Potensi Kawasan Indonesia.

Tiongkok tentu sangat memperhitungkan serta berharap Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar tetap berada di RCEP serta berperan penting, mengingat India (yang punya PDB terbesar di antara semua anggota) telah keluar dari RCEP yang dengan demikian melemahkan kekuatan RCEP.

Cakupan perdagangan intra-Asia, akan lebih luas jika Asia, termasuk di dalamnya Amerika Utara dan Eropa menjadi pusaran kekuatan ekonomi yang besar, dan Tiongkok akan berpaling dari Uni Eropa menuju Asia. Ini sekaligus menunjukkan kekuatan ekonomi Tiongkok yang spektakuler ke depannya. Tentunya kuncinya tetap membuka diri dengan kesepakatan-kesepakatan global. Jangan menarik diri apalagi melakukan politik proteksionis. Posisi Indonesia dengan jumlah penduduknya saat ini maupun bonus demografi ke depan punya posisi tawar yang besar di mata Tiongkok, sehingga Tiongkok juga harus berhati-hati dan menyenangkan bagi Indonesia ke depannya.

Kita berharap Pemerintah Tiongkok lebih bersahabat dan meninjau ulang beberapa kebijakannya, misalnya keharusan lolos sertifikasi Tiongkok yang selama ini menghambat ekspor barang kita masuk ke Tiongkok.

Saya yakin RCEP akan menjadi semacam *doping* atau pembangkit ekonomi di tengah resesi akibat pandemi Covid-19 untuk Indonesia dan Asia. Liberalisasi perdagangan dan investasi di lingkungan RCEP khususnya Indonesia berharap ada proses penurunan tarif, jalur birokrasi yang efisien, tata ulang regulasi persaingan yang sehat, pengadaan barang secara sehat dan adil, serta pola *e-commerce* yang bisa meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia untuk bersaing masuk ke dunia global, minimal ke 14 Negara RCEP.

Perjanjian bebas RCEP mencakup hampir sepertiga dari populasi dunia (30 persen PDB) dan diprediksi akan menambah US$ 186 miliar ke ekonomi dunia. Oleh karena itu, kesepakatan RCEP sangat bergengsi.

Indonesia harus tegas atas kesepakatan RCEP, di mana tidak termasuk di dalamnya tentang liberalisasi sumber daya manusia dan lingkungan, namun dibatasi hanya sisi layanan dan investasi.

Indonesia masih sangat ketinggalan jauh soal jumlah investasi asing yang masuk. Belum banyak masyarakat tahu bahwa nilai investasi asing/*foreign direct investment* di Indonesia paling kecil dari semua negara ASEAN. Penguasaan Investasi asing di Indonesia hanya 24 persen, terkecil di ASEAN. Rata-rata di *foreign direct investment* (FDI) terhadap PDB adalah 66 persen. Malaysia saja 44,7 persen; Vietnam 50,5 persen; Thailand 44,7 persen; Bolivia 33,7 persen. Jadi jika ada orang kita berbicara Indonesia telah dikuasai asing, sama sekali bukan fakta dan data.

Oleh:
Murpin Josua Sembiring*

Pastikan Bawa Keuntungan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia.

Kita harus memastikan memperoleh manfaat/keuntungan dari RCEP ini antara lain: menciptakan peluang bagi industri Indonesia dalam memanfaatkan rantai nilai kawasan, peningkatan jasa telekomunikasi yang berkualitas tinggi, memicu investor Indonesia untuk berinvestasi di kawasan RCEP, penyedia jasa keuangan diuntungkan, peluang peningkatan kapasitas ekonomi dan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM) dalam kawasan, penegakan kekayaan intelektual di dalam kawasan, perkuat dan perluasan perdagangan digital di kawasan, serta meluasnya akses pasar untuk produk ekspor Indonesia

Indonesia Harus Bermitra Strategis sekaligus Kritis.

Adapun salah satu kekhawatiran terkait kesepakatan RCEP ini adalah banjirnya barang impor dari negara anggota ke Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu penegakan aturan dari *World Trade Organization* (WTO). Jika RCEP ini dalam perjalanannya membawa keterpurukan ekonomi di Indonesia, maka tidak masalah jika Indonesia ambil sikap keluar dari RCEP.

Indonesia berharap RCEP segera diterapkan di Indonesia. Semua pihak yakin terhadap Beijing sebagai mitra dagang yang andal, kuat, dan adil agar format pemulihan ekonomi di kawasan lewat hasil perdagangan dan investasi dapat terjadi dengan cepat.

Proyeksi RCEP memastikan posisi kuat Tiongkok secara geopolitik regionalnya melalui program Belt and Road Initiative (BRI) pasca tekanan perang dagang dan perpecahan yang berlarut-larut dengan Amerika era Donald Trump. Oleh karenanya, Tiongkok dengan sejarahnya yang panjang dengan Indonesia harus punya target membantu kemajuan ekonomi Indonesia untuk pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

Sekalipun RCEP akan dilaksanakan, namun sebagai negara yang besar, Indonesia tetap membuka diri hubungan perdagangan dan investasi dengan Amerika bersama Presiden John Biden. Data empat tahun terakhir menyatakan bahwa Washington selalu jadi mitra dagang dan investasi terbesar kedua di ASEAN. Volume perdagangan Tiongkok dan USA meningkat sebesar 39 persen dari US$ 211,8 miliar menjadi US$ 294,6 miliar. Investasi Amerika juga meningkat 110 persen di kawasan, dari US$ 11,65 miliar menjadi US$ 24,5 miliar. Di sektor energi, ASEAN bersama Amerika Serikat juga telah menyusun rencana kerja sama jangka panjang 2021-2025. Hal itu ditambah dengan kerja sama di sektor ekonomi digital melalui program peningkatan kapasitas sebanyak 4.000 UMKM yang telah dilakukan di kawasan ini.

Belajar dari kekhawatiran India yang mengundurkan diri dari RCEP karena Tiongkok tidak mampu meyakinkan India atas ketakutan pasar domestiknya, terutama produk sektor usaha kecil India akan kalah bersaing karena dibanjiri barang-barang murah produk Tiongkok, maka Pemerintah Indonesia mengajukan pembicaraan khusus kepada Tiongkok agar tidak mematikan produk-produk UMKM kita yang belum kompetitif dengan cara kemitraan strategis yang saling transfer teknologi terapan, *share market* bagi sektor UMKM dan IKM kita dengan Tiongkok.

Hambatan klasik yang mungkin muncul adalah dari pandangan publik Indonesia yang belum sepenuhnya memandang Tiongkok yang profesional, bersahabat dalam hubungan bilateral tanpa ada tendensius ideologi negara, serta dominasi penjajahan ekonomi dan perdagangan gaya era baru.

**Penulis Assoc Prof Dr Murpin Josua Sembiring, Pengamat ekonomi regional/Rektor Universitas Ma Chung Malang*